



POTRET AWAL PENCAPAIAN SDGs PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL DI KAWASAN TELUK TOMINI

Raghel Yunginger
Novri Youla Kandowangko
Idawati Supu
Supartin

Lanto Ningrayati Amali
Lia Amalia
Dizky Ramadani Putri Papeo
Maya Dama.

POTRET AWAL PENCAPAIAN SDGs PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL
DI KAWASAN TELUK TOMINI

Raghel Yunginger
Lanto Ningrayati Amali
Novri Youla Kandowangko
Lia Amalia
Idawati Supu
Dizky Ramadani Putri Papeo
Maya Dama
Supartin



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	EC00302361000, 30 Juli 2023
Pencipta	
Nama	Dr. Raghel Yunginger, MSi, Prof. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom., M.Kom., Ph.D dkk
Alamat	Jln. Pangeran Hidayat III, Kota Gorontalo, Gorontalo, Gorontalo, 96122
Kewarganegaraan	Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	Dr. Raghel Yunginger, MSi, Prof. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom., M.Kom., Ph.D dkk
Alamat	Jln. Pangeran Hidayat III, Kota Gorontalo, Gorontalo, Gorontalo, 96122
Kewarganegaraan	Indonesia
Jenis Ciptaan	Buku
Judul Ciptaan	POHRE AWAL PENCAPAIAN SDG: PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL DI KAWASAN TELUK TOMINI
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	30 Juli 2023, di Gorontalo
Jangka waktu perlindungan	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	000493940

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



h.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananta
NIP. 196412081991011002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Raghel Yunginger, M.Si	Jln. Pangeran Hidayat III, Kota Gorontalo
2	Prof. Lanto Ningrasyti Amali, S.Kom., M.Kom., Ph.D	Jln. Jend. Sudirman No.6 Kota Timur, Kota Gorontalo
3	Prof. Dr. Novi Yosia Kandowangko, MP	Jln. Mangga II, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
4	Lia Amalia, S.KM., M.Kes	Kelurahan Lirwo, Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo
5	Idawati Supu, S.Si., M.Si	Jl. Garuda, Kelurahan Rampong, Kec. Bara Kota Palopo
6	Apt. Dicky Ramadani Putri Papeo, S.Farm, M.S.Farm, MCE	Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kab. Gorontalo
7	Maya Novrita Dama, S.Pd, M.Pd	Jl. Membramo, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo
8	Dr. Supartin, S.Pd., M.Pd	Jln. Rambutan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Raghel Yunginger, M.Si	Jln. Pangeran Hidayat III, Kota Gorontalo
2	Prof. Lanto Ningrasyti Amali, S.Kom., M.Kom., Ph.D	Jln. Jend. Sudirman No.6 Kota Timur, Kota Gorontalo
3	Prof. Dr. Novi Yosia Kandowangko, MP	Jln. Mangga II, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
4	Lia Amalia, S.KM., M.Kes	Kelurahan Lirwo, Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo
5	Idawati Supu, S.Si., M.Si	Jl. Garuda, Kelurahan Rampong, Kec. Bara Kota Palopo
6	Apt. Dicky Ramadani Putri Papeo, S.Farm, M.S.Farm, MCE	Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kab. Gorontalo
7	Maya Novrita Dama, S.Pd, M.Pd	Jl. Membramo, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo
8	Dr. Supartin, S.Pd., M.Pd	Jln. Rambutan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo



POTRET AWAL PENCAPAIAN SDGs PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL DI KAWASAN TELUK TOMINI

Penulis:

Raghel Yunginger | Lanto Ningrayati Amali
Novri Youla Kandowanko | Lia Amalia
Idawati Supu | Dizky Ramadani Putri Papeo
Maya Dama | Supartin

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

xx,196, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-104-8

Cetakan Pertama:

Juli 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
ANGGOTA IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan ridhoNya, sehingga buku “Potret Awal Pencapaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial Di Kawasan Teluk Tomini” dapat diselesaikan.

Buku ini disusun dengan tujuan menguraikan peta data pencapaian target SDGs yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pencapaian target SDGs dan arah pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Potret awal pilar sosial tentang kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, serta masalah perempuan dan anak merupakan isu penting dalam pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Meskipun demikian buku ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis membuka diri atas saran dan kritikan demi perbaikan ke depan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menambah khazanah pengetahuan.

Penulis

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Sebagai Penyempurnaan Milenium Development Goals (MDGs).....	3
1.2 Pilar Pembangunan Sosial	7
BAB II Kawasan Teluk Tomini	41
2.1. Provinsi Sulawesi Utara	41
2.2 Provinsi Gorontalo	44
2.3. Provinsi Sulawesi Tengah	47
BAB III Analisis Baseline Data Sdgs Pilar Sosial Goal 1 Di Kawasan Teluk Tomini	51
BAB IV Analisis Baseline Data Sdgs Pilar Sosial Goal 2 Di Kawasan Teluk Tomini	100
BAB V Analisis Baseline Data Sdgs Pilar Sosial Goal 3 Di Kawasan Teluk Tomini	132
BAB VI Analisis Baseline Data Sdgs Pilar Sosial Goal 4 Di Kawasan Teluk Tomini	160
BAB VII Analisis Baseline Data Sdgs Pilar Sosial Goal 5 Di Kawasan Teluk Tomini	163
BAB VIII Penutup.....	189
DAFTAR PUSTAKA	192
GLOSARIUM.....	195

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pemetaan Tujuan, Target dan Indikator SDGs pada Pilar Sosial Berdasarkan Metadata Edisi II	8
Tabel 1.2	Target dan Indikator yang Terdapat pada Goals 1 SDGs (Meniadakan Kemiskinan) Berdasarkan Metadata Edisi II Tahun 2020	10
Tabel 1.3	Target dan Indikator yang Terdapat pada Goals 2 SDGs (Mengakhiri Kelaparan) Berdasarkan Metadata Edisi II Tahun 2020	14
Tabel 1.4	Target dan Indikator yang Terdapat pada Goals 3 SDGs (Mengakhiri Kelaparan) Berdasarkan Metadata Edisi II Tahun 2020	18
Tabel 1.5	Target dan Indikator yang Terdapat pada Goals 4 SDGs (Pendidikan Berkualitas) Berdasarkan Metadata Edisi II Tahun 2020	23
Tabel 1.6	Target dan Indikator yang Terdapat pada Goals 5 SDGs (Pendidikan Berkualitas) Berdasarkan Metadata Edisi II Tahun 2020	29
Tabel 1.7	Daftar Indikator SDGs/TPB Goal 1 pada Metadata Edisi II Berdasarkan Disagregasi Kabupaten/Kota	32
Tabel 1.8	Daftar Indikator SDGs/TPB Goal 2 pada Metadata Edisi II Berdasarkan Disagregasi Kabupaten/Kota	34
Tabel 1.9	Daftar Indikator SDGs/TPB Goal 3 pada Metadata Edisi II Berdasarkan Disagregasi Kabupaten/Kota	35
Tabel 1.10	Daftar Indikator SDGs/TPB Goal 4 pada Metadata Edisi II Berdasarkan Disagregasi Kabupaten/Kota	36
Tabel 1.11	Daftar Indikator SDGs/TPB Goal 5 pada Metadata Edisi II Berdasarkan Disagregasi Kabupaten/Kota	38
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk (Jiwa) di Provinsi Gorontalo dan setiap Kabupaten/Kota dari Tahun 2016-2022	46
Tabel 3.1	Kondisi Ketercapaian Indikator SDGs Terpilih Pilar Sosial Goal 1 Indikator 1.1.1 Berdasarkan Data BPS	52

Tabel 3.2	Kondisi Ketercapaian Indikator SDGs Terpilih Pilar Sosial Goal 1 Indikator 1.2.1* Berdasarkan Data BPS	58
Tabel 3.3	Kondisi Ketercapaian Indikator SDGs Terpilih Pilar Sosial Goal 1 Indikator 1.2.2* Khususnya Dimensi Kesehatan Imunisasi Dasar Berdasarkan Data BPS	65
Tabel 3.4	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020 ...	71
Tabel 3.5	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2021 ...	72
Tabel 3.6	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	75
Tabel 3.7	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	75
Tabel 3.8	Jumlah 10 penyakit terbanyak di Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2020	79
Tabel 3.9	Kondisi Ketercapaian Indikator 1.2.2* Khususnya Dimensi Pendidikan pada Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Data BPS	83
Tabel 3.10	Kondisi Ketercapaian Indikator 1.2.2* Khususnya Dimensi Pendidikan pada Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Data BPS	87
Tabel 3.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Sumber Air Minum Utama di Provinsi Gorontalo (Persen) (Sumber: BPS Provinsi Gorontalo)	93
Tabel 4.1	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2, berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan ketersediaan data.	100
Tabel 4.2	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan ketersediaan data..	101
Tabel 4.3	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Kab. Bolaang Mongondow Timur berdasarkan ketersediaan data....	102

Tabel 4.4	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan ketersediaan data.....	103
Tabel 4.5	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Kab. Banggai berdasarkan ketersediaan data.....	104
Tabel 4.6	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Kab. Tojo Una-Una berdasarkan ketersediaan data.....	105
Tabel 4.7	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Kab. Poso berdasarkan ketersediaan data.	105
Tabel 4.8	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Kab. Parigi Moutong berdasarkan ketersediaan data.....	106
Tabel 4.9	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Prov. Gorontalo berdasarkan ketersediaan data.	107
Tabel 4.10	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Kab. Pohuwato berdasarkan ketersediaan data	108
Tabel 4.11	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Kab. Boalemo berdasarkan ketersediaan data.....	109
Tabel 4.12	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan Kab. Gorontalo berdasarkan ketersediaan data	110
Tabel 4.13	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 berdasarkan kewenangan kab. Bone Bolango berdasarkan ketersediaan data	111
Tabel 4.14	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 2 Berdasarkan kewenangan Kota Gorontalo berdasarkan ketersediaan data.	112
Tabel 4.15	Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Utara tahun 2030	113

Tabel 4.16 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Prov Sulawesi Utara	113
Tabel 4.17 Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Kab. Bolaang Mongondow Selatan tahun 2030	114
Tabel 4.18 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Bolaang Mongondow Selatan	115
Tabel 4.19 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Bolaang Mongondow Timur tahun 2030	116
Tabel 4.20 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	116
Tabel 4.21 Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Prov. Sulawesi Tengah tahun 2030	117
Tabel 4.22 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Prov. Sulawesi Tengah	117
Tabel 4.23 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Banggai tahun 2030	118
Tabel 4. 24 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembanguna sosial Kabupaten Banggai.	118
Tabel 4. 25 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Tojo Una-Una tahun 2030	119
Tabel 4.26 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Tojo Una-Una	119
Tabel 4.27 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Poso tahun 2030	120
Tabel 4.28 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Poso.....	121
Tabel 4.29 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Parigi Moutong tahun 2030	122
Tabel 4.30 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kabupaten Parigi Moutong.....	122
Tabel 4.31 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Prov. Gorontalo tahun 2030	123
Tabel 4.32 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Prov. Gorontalo	123

Tabel 4.33 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Pohuwato tahun 2030	125
Tabel 4.34 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Pohuwato	125
Tabel 4.35 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Boalemo tahun 2030	126
Tabel 4.36 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Boalemo	126
Tabel 4.37 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Gorontalo tahun 2030	127
Tabel 4.38 Kondisi Ketercapaian Indikator SDGs Terpilih Pilar Pembangunan Sosial Kabupaten Gorontalo	127
Tabel 4.39 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Bone Bolango Tahun 2030	128
Tabel 4.40 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kabupaten Bone Bolango	128
Tabel 4.41 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kota Gorontalo tahun 2030	130
Tabel 4.42 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kota Gorontalo.	130
Tabel 5.1 Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/sdgs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan ketersediaan data	132
Tabel 5.2 Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan ketersediaan data..	133
Tabel 5.3 Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Kab.Bolaang Mongondow Timur berdasarkan ketersediaan data	134
Tabel 5.4 Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan ketersediaan data	135

Tabel 5.5	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Kab. Banggai berdasarkan ketersediaan data	136
Tabel 5.6	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Kab. Tojo Una-Una berdasarkan ketersediaan data.....	136
Tabel 5.7	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan social goals 3 berdasarkan kewenangan Kab. Poso berdasarkan ketersediaan data	137
Tabel 5.8	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan Kewenangan Kab. Parigi Moutong berdasarkan ketersediaan data	138
Tabel 5.9	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Prov. Gorontalo berdasarkan ketersediaan data.	138
Tabel 5.10	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Kab. Pohuwato berdasarkan ketersediaan data.	140
Tabel 5.11	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Kab. Boalemo berdasarkan ketersediaan data.....	141
Tabel 5.12	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Kab. Gorontalo berdasarkan ketersediaan data.	141
Tabel 5.13	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 berdasarkan kewenangan Kab. Bone Bolango berdasarkan ketersediaan data.	142
Tabel 5.14	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial goals 3 Berdasarkan kewenangan Kota Gorontalo berdasarkan ketersediaan data	142
Tabel 5.15	Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Utara tahun 2030	143
Tabel 5.16	Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Prov Sulawesi Utara	143

Tabel 5.17 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Bolaang Mongondow Selatan tahun 2030	145
Tabel 5.18 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Bolaang Mongondow Selatan	146
Tabel 5.19 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Bolaang Mongondow Timur tahun 2030	146
Tabel 5.20 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	147
Tabel 5.21 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Prov. Sulawesi Tengah tahun 2030	147
Tabel 5.22 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Prov. Sulawesi Tengah	148
Tabel 5.23 Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Kab. Banggai tahun 2030	149
Tabel 5.24 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Banggai.	150
Tabel 5.25 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Tojo Una-Una tahun 2030	150
Tabel 5.26 Kondisi Ketercapaian Indikator SDGs Terpilih Pilar Pembangunan Sosial Kab. Tojo Una-Una	150
Tabel 5.27 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Poso tahun 2030	151
Tabel 5.28 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Poso.....	151
Tabel 5.29 Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Kab. Parigi Moutong tahun 2030	152
Tabel 5.30 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Parigi Moutong	152
Tabel 5.31 Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Prov. Gorontalo tahun 2030	153
Tabel 5.32 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Prov. Gorontalo	153
Tabel 5.33 Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Kab. Pohuwato tahun 2030	155

Tabel 5.34 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Pohuwato	155
Tabel 5.35 Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Kab. Boalemo Tahun 2030	156
Tabel 5.36 Kondisi Ketercapaian Indikator SDGs Terpilih Pilar Pembangunan Sosial Kab. Boalemo.....	156
Tabel 5.37 Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Kab. Gorontalo Tahun 2030	157
Tabel 5.38 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Gorontalo	157
Tabel 5.39 Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Kab. Bone Bolango tahun 2030	158
Tabel 5.40 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Bone Bolango.	158
Tabel 5.41 Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Kota Gorontalo Tahun 2030	159
Tabel 5.42 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kota Gorontalo.	159
Tabel 7.1 Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan ketersediaan data.....	163
Tabel 7.2 Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan kewenangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan ketersediaan data..	164
Tabel 7.3 Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan kewenangan Kab.Bolaang Mongondow Timur berdasarkan ketersediaan data	165
Tabel 7.4 Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan ketersediaan data.....	165
Tabel 7.5 Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan ketersediaan data ...	166

Tabel 7.6	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan Kewenangan Kab. Tojo Una-Una berdasarkan ketersediaan data	167
Tabel 7.7	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan Kewenangan Kab. Poso berdasarkan ketersediaan data.	167
Tabel 7.8	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan Kewenangan Kab. Parigi Moutong berdasarkan ketersediaan data	168
Tabel 7.9	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan Kewenangan Prov. Gorontalo berdasarkan ketersediaan data	168
Tabel 7.10	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan Kewenangan Kab. Pohuwato berdasarkan ketersediaan data	169
Tabel 7.11	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan Kewenangan Kab. Boalemo berdasarkan ketersediaan data	170
Tabel 7.12	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan Kewenangan Kab. Gorontalo berdasarkan ketersediaan data	171
Tabel 7.13	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 berdasarkan Kewenangan Kab. Bone Bolango berdasarkan ketersediaan data	172
Tabel 7.14	Hasil pemetaan indikator dan capaian tahun 2021 TPB/SDGs pilar pembangunan sosial Goals 5 Berdasarkan Kewenangan Kota Gorontalo berdasarkan ketersediaan data	172
Tabel 7.15	Proyeksi Ketercapaian Target TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2030	173
Tabel 7.16	Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Prov Sulawesi Utara	173
Tabel 7.17	Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Bolaang Mongondow Selatan tahun 2030	174
Tabel 7.18	Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Bolaang Mongondow Selatan	175

Tabel 7.19 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Bolaang Mongondow TimurTahun 2030.....	176
Tabel 7.20 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	176
Tabel 7.21 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Prov. Sulawesi Tengah tahun 2030	176
Tabel 7.22 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Prov. Sulawesi Tengah	177
Tabel 7.23 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Banggai tahun 2030	178
Tabel 7.24 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Banggai.	178
Tabel 7.25 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Tojo Una-Una tahun 2030	179
Tabel 7.26 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Tojo Una-Una	179
Tabel 7.27 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Poso tahun 2030	179
Tabel 7.28 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Poso.....	180
Tabel 7.29 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Parigi Moutong tahun 2030	180
Tabel 7.30 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Parigi Moutong	180
Tabel 7.31 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Prov. Gorontalo tahun 2030	181
Tabel 7.32 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Prov. Gorontalo	181
Tabel 7.33 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Pohuwato tahun 2030	183
Tabel 7.34 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Pohuwato	183
Tabel 7.35 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Boalemo tahun 2030	184

Tabel 7.36 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Boalemo 184

Tabel 7.37 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Gorontalo tahun 2030 184

Tabel 7.38 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Gorontalo 185

Tabel 7.39 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kab. Bone Bolango tahun 2030 186

Tabel 7.40 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kab. Bone Bolango. 186

Tabel 7.41 Proyeksi ketercapaian target TPB/SDGs Kota Gorontalo tahun 2030 187

Tabel 7.42 Kondisi ketercapaian indikator SDGs terpilih pilar pembangunan sosial Kota Gorontalo. 187

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Luas tiga provinsi yang Bersinggungan dengan Kawasan Teluk Tomini.....	42
Gambar 2.2	Luas wilayah (km ²) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.	42
Gambar 2.3	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2000-2020 (BPS, 2022).....	43
Gambar 2.4	Persentasi luas wilayah setiap kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.....	45
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk (jiwa) di tiga Provinsi yang Berada Di Kawasan Teluk Tomini Tahun 2020 (Sumber: BPS,2022)..	47
Gambar 2.6	Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.....	49
Gambar 2.7	Persentase Luas Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah.....	50
Gambar 3.1	Grafik persentase kemiskinan ekstrim di Dua Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2016-2021.....	54
Gambar 3.2	Pencapaian Indikator 1.1.1* di Lima Daerah Provinsi Gorontalo.....	56
Gambar 3.3	Indikator Kemiskinan Berdasarkan 3 Dimensi dan 14 Indikator.	63
Gambar 3.4	Capaian Angka Kematian Balita (AKABA) di Provinsi Gorontalo Tahun 2021.....	73
Gambar 3.5	Jumlah Kematian Balita Menurut Kabupate/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	76
Gambar 3.6	Jumlah Kasus Baru Penyakit Kusta Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	77
Gambar 3.7	Jumlah Kasus Baru AIDS Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	78
Gambar 3.8	Grafik <i>Case Detection Rate</i> (CDR) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2020.....	80
Gambar 3.9	Angka prevalensi Kusta di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.....	81

Gambar 3.10	Kasus HIV di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulteng Tahun 2020	82
Gambar 3.11	Data APS Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2020	89
Gambar 3.12	Data APS Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2021	90
Gambar 3.13	Jumlah dan Persentase Sarana Air Minum Memenuhi Syarat Kabupaten / Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2021	94
Gambar 3.14	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Utama Bukan Listrik di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020-2022	97
Gambar 6.1	Persentasi Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Tiga Provinsi Kawasan Teluk Tomini Tahun 2020-2022	162



BAB 1 PENDAHULUAN

Kerangka agenda pembangunan nasional yang diatur melalui Perpres No.59 Tahun 2017 merupakan kebijakan nasional dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *sustainable development goals* (SDGs) yang secara global merupakan agenda hingga Tahun 2030. Agenda pembangunan ini mewajibkan rumusan arah pembangunan dan langkah-langkah strategi dilakukan secara tersistematis dalam perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur, saling terintegrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini artinya bahwa dokumen perencanaan pembangunan harus mengarusutamakan tujuan TPB/SDGs yang secara sistematis terumuskan dalam dokumen rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD) yang harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah pusat harus menyusun rencana aksi nasional (RAN) SDGs dan begitupun hal pemerintah provinsi wajib menyusun rencana aksi daerah (RAD) SDGs. Disamping itu, pencapaian TPB/SDGs tidak hanya membutuhkan komitmen pemerintah pusat yang sinergi dengan pemerintah daerah tetapi juga membutuhkan komitmen berbagai elemen masyarakat yang bukan pemerintah (*non-state actor*) yang saling sinergi dengan pemerintah.

Disamping itu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan membutuhkan strategi pengelolaan yang didukung dengan data dan kajian yang komprehensif untuk menjadi pijakan dalam menentukan rumusan kebijakan arah pembangunan. Dalam agenda TPB atau SDGs menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi tetapi kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling mendukung antara sektor ekonomi, sosial, lingkungan dan juga tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat pilar pembangunan ini harus berkembang secara seimbang sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi seiring dengan peningkatan kondisi sosial masyarakat yang lebih baik dengan unsur

lingkungan yang terjaga untuk kehidupan masa kini dan akan datang dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Inilah konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi landasan strategi dan arah pembangunan Indonesia di segala bidang sehingga pencapaian tujuan pembangunan dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang. Untuk itu rumusan strategi pencapaian SDGs secara efektif dan efisien perlu dilandaskan juga pada kajian yang mengungkapkan profil daerah yang mencakup potensi dan permasalahan yang terdapat di setiap daerah termasuk daerah yang berada di kawasan Teluk Tomini.

Teluk Tomini merupakan salah satu teluk terbesar di Indonesia dan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dan unik serta tergolong perairan semi tertutup. Kawasan Teluk Tomini dikenal dengan dengan keindahan terumbu karang dengan ratusan hektar mangrove sehingga didorong oleh pemerintah Indonesia menjadi kawasan wisata laut terbesar di dunia. Teluk ini bersinggungan langsung dengan tiga provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo yang dilewati garis katulistiwa serta berada pada garis *Wallace-Weber*, sehingga memiliki kekayaan flora dan fauna beraneka ragam baik di darat maupun di laut. Namun bonus potensi kekayaan alam yang sangat melimpah dan strategis di tiga provinsi dan bahkan dengan Maluku Utara ini ternyata belum mampu mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat di sekitar kawasan Teluk Tomini. Seharusnya kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan beraneka ragam di kawasan Teluk Tomini menjadi potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan budaya dan kearifan lokal menjadi kekayaan setiap daerah.

Permasalahan kemiskinan yang dihadapi pemerintah daerah di kawasan Teluk Tomini diperparah dengan adanya kejadian pandemi Covid-19 yang makin menyulitkan pemerintah dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Padahal saat ini Indonesia memasuki periode "*decade of action*" dalam SDGs yang berarti bahwa setiap daerah sudah mengimplementasikan tahapan pembangunan berbasis SDGs. Untuk itu setiap daerah harus bangkit kembali pasca pandemic Covid-19 untuk memulihkan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah tersedianya data yang memotret profil daerah di kawasan Teluk Tomini berdasarkan indikator SDGs sebagai

landasan untuk perumusan strategi dan arah pembangunan yang berkelanjutan secara efektif dan efisien.

Dalam perencanaan pembangunan, data merupakan unsur penting yang menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai isu strategis daerah dalam pencapaian SDGs. Namun di sisi lain potret data awal berbasis SDGs terutama untuk pilar sosial di kawasan Teluk Tomini belum tersedia secara komprehensif. Kondisi ini kurang mendukung pemerintah dalam upaya pencapaian target SDGs sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia. Sebagai contoh peta data dasar kondisi pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar, kondisi akses layanan pendidikan dan sumber daya manusia, serta sistem perlindungan terhadap anak dan perempuan di setiap kabupaten/kota di kawasan Teluk Tomini belum memiliki kajian yang mendalam baik kondisi *existing* maupun proyeksinya. Padahal profil daerah terpetakan berbasis data awal SDGs dan proyeksinya, maka pemerintah daerah memiliki *baseline* untuk merumuskan strategi pencapaian SDGs/TPB. Oleh karena itu data awal SDGs khususnya pilar sosial telah dikaji sebagai *baseline* bagi pemerintah daerah di kawasan Teluk Tomini dalam merumuskan strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi ketercapaian SDGs/TPB menjadi bagian yang penting dalam tahapan mengukur kondisi setiap daerah dalam implementasi SDGs. Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mencapai target SDGs maka setiap provinsi hingga kabupaten/kota mengevaluasi profil kondisi pencapaian SDGs sesuai yang telah diatur dalam Perpres No 56 Tahun 2017 dan Perpres No.111 Tahun 2022. Untuk itu proses monitoring sangat membutuhkan ketersediaan data dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota. Namun dalam prosesnya, banyak tantangan yang ditemui salah satunya adalah masih minimnya data sebagai sumber utama dalam melakukan proyeksi/peramalan capaian indikator TPB/SDGs.

1.1 Sustainable Development Goals (SDGs) Sebagai Penyempurnaan Milenium Development Goals (MDGs)

Masalah kemiskinan bagi seluruh manusia di dunia dan kesenjangan yang terjadi antara negara serta terdegradasinya lingkungan yang ditunjukkan dengan adanya perubahan iklim global menjadi dasar bagi negara-negara yang

terhimpun dalam keanggotaan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mendeklarasikan agenda global pada Bulan September Tahun 2015 yaitu *sustainable development goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Konsep dasar SDGs/TPB adalah menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara berkelanjutan dengan prinsip *no one left behind*. Oleh karena itu target SDGs secara global adalah mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Pencapaian tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui empat elemen tujuan pembangunan berkelanjutan yang saling mendukung yaitu; (1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi; (2) Pembangunan sosial; (3) Konservasi sumberdaya alam (perlindungan lingkungan); dan (4) Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada dasarnya SDGs/TPB merupakan agenda lanjutan dan penyempurnaan dari agenda *millennium development goals* (MDGs) dilaksanakan selama 5 tahun yaitu Tahun 2010 dan berakhir Tahun 2015. MDGs sebagai agenda global memiliki kelemahan yaitu agenda ini didirikan oleh negara-negara berkembang, bersifat *single platform*, sumber pembiayaan yang masih bersumber dari satu sumber atau *single money*, masih terkesan diskriminatif dan hanya memenuhi capaian setengahnya dari target yang dirumuskan. Oleh karena itu prinsip yang mendasari perubahan MDGs menjadi SDGs adalah SDGs bersifat universal, partisipatif, saling integrasi, dan tidak mengecualikan siapa pun atau *no one left behind*. Namun meskipun MDGs yang hanya dapat mencapai 49 indikator dari 67 indikator dan 8 Goals yang diagendakan, namun keberhasilan MDGs menjadi tonggak untuk pelaksanaan agenda SDGs yang memiliki 17 tujuan atau *goals* untuk dicapai hingga Tahun 2030.

Adapun 17 goals SDGs meliputi; 1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi layak; 7) energi bersih dan terjangkau; 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) industri, inovasi dan infrastruktur; 10) berkurangnya kesenjangan; 11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13)

penanganan perubahan iklim; 14) ekosistem lautan; 15) ekosistem daratan; 16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan 17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada prinsipnya untuk pencapaian 17 tujuan SDGs tidak terdapat perbedaan antara negara maju dan negara berkembang atau bersifat universal sehingga dalam pembiayaanya pun bersumber dari seluruh negara baik negara maju, negara berkembang maupun negara tertinggal. Disamping itu SDGs merupakan semangat dan ambisi pembangunan secara global yang menghapus kemiskinan secara tuntas sehingga terwujud kesejahteraan manusia secara berkelanjutan yaitu tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga hingga generasi akan datang. Untuk itu SDGs memiliki prinsip yang mengakomodir hak asasi manusia (HAM) sehingga tidak ada yang didiskriminasi atau memiliki prinsip *no one left behind*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk pencapaian tujuan SDGs, oleh karena itu pemerintah menerbitkan PERPRES No.17 Tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan SDGs yang terdiri dari 17 goals dan 319 indikator. SDGs menjadi kerangka pembangunan nasional dan menjadi dasar juga bagi pemerintah daerah untuk mengarusutamakan SDGs dalam dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya untuk menyempurnakan pelaksanaan SDGs, maka pemerintah menerbitkan PERPRES No. 111 Tahun 2022 untuk mempercepat pencapaian target SDGs yang terdiri dari 17 goals dan 289 indikator. Tujuan SDGs yang berjumlah 17 goals ini diklasifikasikan berdasarkan pilar pembangunan yaitu pilar sosial (5 goals), pilar ekonomi (5 goals), pilar lingkungan (6 goals), dan pilar hukum dan tata kelola (1 goal). Rujukan metodologi pencapaian SDGs ini dituangkan dalam metadata SDGs dan saat ini dokumen metadata SDGs telah disempurnakan dalam metadata Edisi II Tahun 2020 (Bappenas, 2020).

Berdasarkan metadata SDGs yang diterbitkan oleh kementerian PPN/Bappenas Edisi II Tahun 2020 (Bappenas, 2020) bahwa 17 goals SDGs memiliki 124 target dan 289 indikator yang dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar SDGs yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. Keempat pilar ini tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan SDGs. Adapun klasifikasi 17 goals SDGs dalam empat dokumen pilar SDGs yaitu;

1. Pilar Pembangunan Sosial. Pilar ini terdiri dari 5 goals yaitu; goal 1 (tanpa kemiskinan); Goal 2 (tanpa kelaparan); goal 3 (kehidupan sehat

dan sejahtera); goal 4 (pendidikan berkualitas), dan goal 5 (kesetaraan gender).

2. Pilar Pembangunan Ekonomi. Pilar ini terdiri dari 5 goals yaitu; goal 7 (energi bersih dan terjangkau; goal 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi); goal 9 (industri, inovasi dan infrastruktur); goal 10 (berkurangnya kesenjangan), dan goal 17(kemitraan untuk mencapai tujuan).
3. Pilar Pembangunan Lingkungan. Pilar ini meliputi 6 goals yaitu; goal 6 (air bersih dan sanitasi layak), goal 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan), goal 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), goal 13 (penanganan perubahan iklim), goal 14 (ekosistem lautan, dan goal 15 (ekosistem daratan).
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang meliputi satu goal yaitu goal 16 tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan indikator SDGs yang bersesuaian dengan indikator nasional atau membuat proksi dan target sendiri sebagai target daerah untuk mencapai target nasional. Sementara untuk ketersediaan data yang terdapat di BPS wajib menjadi perhatian bagi daerah untuk memasukkan indikator tersebut dalam RAD. Untuk itu daerah memiliki panduan metadadada nasional dalam menyusun indikator kewenangan daerah dengan memperhatikan disagregasi data (nasional, provinsi dan kabupaten/kota). Dengan berdasarkan panduan metadata tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui potensi ketersediaan data di lingkup urusan masing-masing sebagai dasar penyusunan rencana aksi daerah. Sekretariat Nasional SDGs telah memetakan beberapa tipe indikator SDGs yang berkaitan dengan dokumen perencanaan daerah (Sofianto, 2019) yaitu :

1. Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
2. Indikator ini merupakan indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global (contoh: Angka Kematian Ibu);
3. Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
4. Indikator nasional ini merupakan konsep dan pengukurannya berupa
5. Indikator global yang harus dikembangkan,

Indikator ini merupakan indikator global yang belum dimiliki Indonesia dan belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum tersedia (contoh: keasaman (pH) laut).

Berdasarkan metadata edisi II (Bappenas, 2021) terdapat perubahan jumlah indikator global yang awalnya berjumlah 241 indikator menjadi 247 indikator pada April 2020 dan meliputi perubahan tingkatan indikator (*Tiers*), dan redaksional metadata indikator global. Pada metadata edisi II terdapat 289 indikator dari sebelumnya 319 indikator pada Edisi I yang mencakup 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs. Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II ini telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan menjadi rujukan penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs periode 2020-2024 serta Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan RPJMD. Untuk itu setiap daerah diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah indikator SDGs yang dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah yang tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kemampuan fiskal daerah.

1.2 Pilar Pembangunan Sosial

Salah satu pilar dalam SDGs yaitu pilar sosial yang terdiri dari 5 tujuan/goals. Pilar sosial memfokuskan pada pemenuhan hak dasar manusia secara adil, berkualitas dan setara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan target dari 5 goals SDGs. Pada Tabel 1.1 terdapat pengelompokan 5 goals SDGs yang masuk pada pilar sosial beserta jumlah target dan indikator yang merujuk pada metadata edisi II Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Tabel 1. 1 Pemetaan Tujuan, Target dan Indikator SDGs pada Pilar Sosial Berdasarkan Metadata Edisi II

Tujuan/Goals	Target		Indikator		
	Jumlah Total Target	Kode	Jumlah per target	Kode per target	Total Jumlah Indikator
 Tujuan 1 Menghapus Kemiskinan	7	1.1	1	1.1.1*	15
		1.2	2	1.2.1*, 1.2.2*	
		1.3	3	1.3.1*,1.3.1.(a), 1.3.1.(b)	
		1.4	2	1.4.1*,1.4.2*	
		1.5	4	1.5.1*, 1.5.2*, 1.5.3*, 1.5.4*	
		1.a	2	1.a.1*, 1.a.2*	
		1.b	1	1.b.1	
 Tujuan 2: Mengakhiri Kelaparan	8	2.1	2	2.1.1*,2.1.2*	17
		2.2	4	2.2.1*, 2.2.2*, 2.2.2.(a), 2.2.3*	
		2.3	3	2.3.1*, 2.3.1 (a), 2.3.2*	
		2.4	2	2.4.1, 2.4.1(a)	
		2.5	2	2.5.1*, 2.5.2*	
		2.a	2	2.a.1*, 2.a.2*	
		2.b	1	2.b.1*	
		2.c	1	2.c.1*	
 Tujuan 3	13	3.1	2	3.1.1*, 3.1.2*	36
		3.2	2	3.2.1*, 3.2.2*	
		3.3.	8	3.3.1*, 3.3.2*, 3.3.3*, 3.3.3.[a], 3.3.4*, 3.3.5*, 3.3.5.[a], 3.3.5.[b]	

Kesehatan Yang Baik Dan Kesejahteraan		3.4	5	3.4.1, 3.4.1.(a), 3.4.1.(b), 3.4.1.(c), 3.4.2	
		3.5	4	3.5.1, 3.5.1(a), 3.5.1(b), 3.5.2*	
		3.6	1	3.6.1	
		3.7	3	3.7.1*, 3.7.2*, 3.7.2.[a]	
		3.8	4	3.8.1*, 3.8.1.[a], 3.8.2*, 3.8.2.[a]	
		3.a	1	3.a.1*	
		3.b	3	3.b.1*, 3.b.2*, 3.b.3*	
		3.c	1	3.c.1*	
		3.d	2	3.d.1*, 3.d.2	
 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	10	4.1	4	4.1.1, 4.1.1.(a), 4.1.2*, 4.1.2.[a]	18
		4.2	2	4.2.1*, 4.2.2*	
		4.3	2	4.3.1*, 4.3.1.[a]	
		4.4	2	4.4.1, 4.4.1.(a)	
		4.5	1	4.5.1*	
		4.6	2	4.6.1, 4.6.1.(a)	
		4.7	1	4.7.1	
		4.a	2	4.a.1*, 4.a.1.[a]	
		4.b	1	4.b.1*	
		4.c	1	4.c.1*	
	9	5.1	1	5.1.1*	14
		5.2	2	5.2.1*, 5.2.2*	
		5.3	2	5.3.1*, 5.3.2	
		5.4	1	5.4.1	
		5.5	2	5.5.1*, 5.5.2*	
		5.6	2	5.6.1*, 5.6.2*	
		5.a	2	5.a.1*, 5.a.2*	

Tujuan 5 Kesetaraan Gender	5.b	1	5.b.1*	
	5.c	1	5.c.1*	

Pada Tabel 1.1 dikelompokkan jumlah target dan jumlah indikator untuk setiap target yang ada pada setiap tujuan pilar sosial SDGs. Tujuan 1 (menghapus kemiskinan) memiliki 7 target dengan 15 indikator, tujuan 2 (mengakhiri Kelaparan) memiliki 8 target dan 17 indikator, tujuan 3 (kesehatan yang baik dan kesejahteraan) memiliki 13 target dan 36 indikator, tujuan 4 (pendidikan berkualitas) memiliki 10 target dan 18 indikator, tujuan 5 (kesetaraan gender) memiliki 9 target dan 14 indikator. Dengan demikian pilar sosial memiliki 5 tujuan dengan 47 target serta 100 indikator. Adapun nama target dan indikator untuk tujuan 1 ditampilkan pada Tabel 1.2, tujuan 2 pada Tabel 1.3, tujuan 3 pada Tabel 1.4, tujuan 4 pada Tabel 1.5, dan tujuan 5 pada Tabel 1.6.

Tabel 1. 2 Target dan Indikator yang Terdapat pada Goals 1 SDGs (Meniadakan Kemiskinan) Berdasarkan Metadata Edisi II Tahun 2020

Target		Indikator	
Kode	Nama Target	Kode	Nama Indikator
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.
1. 2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok

	laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		umur.
		1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anakanak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, Khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi,	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.
		1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan

	serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
		1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.
		1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030
		1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana

1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
		1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
1.b	Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan	1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.

	yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan		
--	--	--	--

Tabel 1. 3 Target dan Indikator yang Terdapat pada Goals 2 SDGs (Mengakhiri Kelaparan) Berdasarkan Metadata Edisi II Tahun 2020

Target		Indikator	
Kode	Nama Target	Kode	Nama Indikator
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.
		2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.

	bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
		2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan
		2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan
		2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga	2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.
		2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan

	ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.		
2.5	Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.
		2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.

2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.
		2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.
2.b	Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.	2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.

2.c	Mengadopsi langkahlangkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan
-----	---	--------	--------------------------------

Tabel 1. 4 Target dan Indikator yang Terdapat pada Goals 3 SDGs (Mengakhiri Kelaparan) Berdasarkan Metadata Edisi II Tahun 2020

Target		Indikator	
Kode	Nama Target	Kode	Nama Indikator
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).
		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.

3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.
		3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang
		3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.
		3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
		3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.
		3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.

		3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.
		3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.
		3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
		3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.
		3.5.1(a)	Umlah penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis
		3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.
		3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir

3.6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern
		3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10- 14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.
		3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.
		3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.
		3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.
		3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.
		3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.
		3.9.3	Angka kematian akibat keracunan
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.
		3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.
		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan

	Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.		
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
3.d	Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan di 088ni, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.
		3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.

Tabel 1. 5 Target dan Indikator yang Terdapat pada Goals 4 SDGs (Pendidikan Berkualitas) Berdasarkan Metadata Edisi II Tahun 2020

Target		Indikator	
Kode	Nama Target	Kode	Nama Indikator
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum

	menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif		dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
		4.1.1(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika
		4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.
		4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.
		4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin

4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin
		4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.

	maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.
4.7	Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.

	pembangunan berkelanjutan		
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
		4.a.1(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir
4.b	Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik,	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang

	program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.		
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
		4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Tabel 1. 6 Target dan Indikator yang Terdapat pada Goals 5 SDGs (Pendidikan Berkualitas) Berdasarkan Metadata Edisi II Tahun 2020

Target		Indikator	
Kode	Nama Target	Kode	Nama Indikator
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun
		5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15- 49 tahun yang telah

			menjalani FGM/C, menurut kelompok umur
5.4	Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.

	Beijing Platform serta dokumendokumen hasil revidi dari konferensikonferensi tersebut.		
		5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
5.a	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.
		5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

5.c	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
-----	--	--------	---

Adapun indikator SDGs pada pilar sosial berdasarkan disagregasi kabupaten/kota yang terdapat pada metadadata edisi II berjumlah 42 indikator. Pada tujuan 1 terdapat 10 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Tabel 1.7), pada tujuan 2 terdapat 7 indikator (Tabel 1.8), pada tujuan 3 terdapat 13 indikator (Tabel 1.9), pada tujuan 4 terdapat 8 indikator (Tabel 1.10), dan pada tujuan 5 terdapat 4 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Tabel 1.11).

Tabel 1. 7 Daftar Indikator SDGs/TPB Goal 1 pada Metadata Edisi II Berdasarkan Disagregasi Kabupaten/Kota

Tujuan/goals	Target	Indikator		
		Kode	Nama Indikator	Jumlah
 Tujuan 1 Menghapus Kemiskinan	1.1	1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim	1
	1.2	1.2.1*	penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	2
		1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anakanak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	

	1.3	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	3
		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	
		1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	
	1.4	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	2
		1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	
	1.5	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	2
		1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi	

			nasional pengurangan risiko bencana	
TOTAL INDIKATOR GOALS 1				10

Tabel 1. 8 Daftar Indikator SDGs/TPB Goal 2 pada Metadata Edisi II Berdasarkan Disagregasi Kabupaten/Kota

Tujuan/goals	Target	Indikator		Jumlah
		Kode	Nama Indikator	
 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	2.1	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	2
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	
	2.2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	2
		2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	
	2.4	2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	1
	2.a	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	1

	2.c	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	1
	TOTAL INDIKATOR GOAL 2			7

Tabel 1. 9 Daftar Indikator SDGs/TPB Goal 3 pada Metadata Edisi II Berdasarkan Disagregasi Kabupaten/Kota

Tujuan/goals	Target	Indikator		Jumlah
		Kode	Nama Indikator	
 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3.1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	2
		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	
	3.3	3.3.3. (a)	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	3
		3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	
		3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	
	3.4	3.4.1. (a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	3
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	
		3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	
	3.5	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	1

	3.8	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essential	3
		3.8.1.(a)	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.	
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	
	3.c	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	1
	TOTAL INDIKATOR GOALS 3			13

Tabel 1. 10 Daftar Indikator SDGs/TPB Goal 4 pada Metadata Edisi II Berdasarkan Disagregasi Kabupaten/Kota

Tujuan/goals	Target	Indikator		Jumlah
		Kode	Nama Indikator	
 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	4.1	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	1
	4.2	4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	2
		4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	
	4.3	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	2

		4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	
	4.4	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	1
	4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	1
	4.6	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	1
	TOTAL INDIKATOR GOALS 4			8

**Tabel 1. 11 Daftar Indikator SDGs/TPB Goal 5 pada Metadata Edisi II
Berdasarkan Disagregasi Kabupaten/Kota**

Tujuan/goals	Target	Indikator		Jumlah
		Kode	Nama Indikator	
 Tujuan 5 Kesetaraan Gender	5.5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	2
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	
	5.6	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	1
	5.b	5.b.1	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	1
	TOTAL INDIKATOR GOALS 5			4

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Z. (2019). Upaya Pemerintahan Joko Widodo dalam Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Website Resmi.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Angka Partisipasi Sekolah (APS).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Persentase Penduduk Miskin Provinsi (Persen).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Sumber Air Minum Utama di Provinsi Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022d). Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Utama Penerangan.
- Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. (2020). Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo.
- Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. (2021). Capaian Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Gorontalo.
- Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah. (2020). Profil Kesehatan Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah. (2021). Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. gorontalo.bps.go.id
- Handrian, E., dan Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (Publika)*, 6(1), 77-87.
- Hidayat, A. A. 2008. Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan. Jakarta : Salemba Medika.
- Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo. (2018). Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

- Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo. (2019). Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
- Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo. (2020). Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
- Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo. (2021). Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, 2020. Metadata Pilar Sosial Edisi II
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, 2020. Metadata Pilar Ekonomi Edisi II
- Muzakir dan Suparman, 2016. Strategy of Developing Tomini Bay for Economic Growth of Coastal Community in Central Sulawesi. *Jejak*, Vol 9 (1).
- Panuluh, S & Fitri, M.R. (2016). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Briefing Paper 02*.
- Patiung, Markus. (2019). Analisis permasalahan, isu strategis dan kebijakan pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 19(1), 33-52.
- PERPRES RI Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan.
- PERPRES RI Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pub. L. No. 111, 158 (2022)
- PERMENDAGRI Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Sarosa, W. (2020). Kota untuk Semua: Hunian yang Selaras dengan Sustainable Development Goals and New Urban Agenda. *Jakarta: Expose*
- SMERU Research Institute. (2017). Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret, *Buletin SMERU No.2/2017*.
- Sofianto, A. (2019). Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25-4.

- Syahputra, H. W. (2021). Proses Integrasi dan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau. *JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, 2(1), 6-13.
- Trinder, J. Zlatanova, S., Jiang, J. 2018. Editorial to theme section on UN Sustainable Development Goals (SDG). *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 142 (2018), 342–343.
- Wolok, E. (2022). The Beauty of Teluk Tomini. Gorontalo: UNG Press

GLOSARIUM

TPB	: Tujuan pembangunan berkelanjutan
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
RPJMD	: Rancangan Program Jangka Menengah Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional	
RAN	: Rencana Aksi Nasional
RAD	: Rencana Aksi Daerah
NSA	: <i>Non State Actor</i>
MDGs	: <i>Milenium Development Goals</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
Kementerian PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DAS	: Daerah Aliran Sungai
BPS	: Balai Pusat Statistik
PPP	: <i>Purchasing Power Parity</i>
OPHI	: <i>Oxford Poverty and Human Development Initiative</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
IDL	: Imuniasi Dasar Lengkap
Imunisasi HB	: Vaksin Hepatitis B
Imunisasi BCG	: <i>Bacillus Calmette-Guérin</i> .
Imunisasi IPV	: <i>Inactive Polio Vaccine</i>
PERPRES	: Peraturan Presiden
BB	: Berat Badan
TB	: Tinggi Badan
U	: Umur
KH	: Kelahiran Hidup
AKABA	: Angka Kematian Balita
TBC	: Tuberculosis
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
(CNR)	: <i>Case Notification Rate</i>
HDR	: <i>Human Development Report</i>
IPM	: Index Pembangunan Manusia
HLS	: Harapan Lama Sekolah
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
Susenas	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
Dinkes	: Dinas Kesehatan
SPAL	: Sarana Pengolahan Air Limbah
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
STBM	: Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan

Teluk Tomini merupakan salah satu teluk terbesar di Indonesia yang bersinggungan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo. Disamping itu kawasan ini dilewati garis katulistiwa dan berada pada garis Wallace-Weber, sehingga memiliki kekayaan flora dan fauna beraneka ragam baik di darat maupun di laut. Namun bonus potensi kekayaan alam yang sangat melimpah dan posisi strategis ini ternyata belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di berbagai sektor di kawasan Teluk Tomini. Di sisi lain pemerintah merumuskan kerangka pembangunan berdasarkan SDGs sesuai yang tertuang pada Perpres No. 59 Tahun 2017 yang kemudian dipertegas dengan Perpres No.111 Tahun 2022. Regulasi ini mewajibkan arah pembangunan yang mengarusutamakan indikator SDGs dalam dokumen perencanaan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah termasuk di kawasan Teluk Tomini. Namun kesulitan yang dihadapi dalam menentukan target daerah dalam pencapaian target nasional dan global adalah kurang jelasnya data dasar sebagai baseline untuk menentukan target capaian dan mengukur ketercapaian SDGs yang telah dicapai pemerintah daerah. Oleh karena itu buku ini disusun untuk memetakan baseline data profil kabupaten/kota di Kawasan Teluk Tomini dalam pencapaian target SDGs khususnya Pilar Pembangunan Sosial, Goals 1,2,3,4, dan 5 berdasarkan Metadata SDGs Edisi II. Harapannya data ini menjadi baseline pemerintah dalam menentukan target capaian pada periode pembangunan yang dimuat dalam dokumen perencanaan daerah. Disamping itu penulisan buku ini memuat hasil proyeksi ketercapaian indikator SDGs pada Pilar Pembangunan Sosial pada Tahun 2024 dan Tahun 2030 berdasarkan target global dan Perpres Nomor 111 Tahun 2022. Dengan demikian hasil analisis dalam buku ini dapat memberikan gambaran proyeksi capaian dan upaya desain skenario strategi prioritas yang harus dirumuskan oleh pemerintah dalam mengatasi indikator SDGs yang masih jauh dari target pencapaian demi untuk mendorong masyarakat di kawasan Teluk Tomini sejahtera secara berkelanjutan dalam berbagai dimensi.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996

ISBN 978-623-147-104-8



9 786231 471048